

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terkait dengan *collaborative governace* program *one village one product* (ovop) di Kabupaten Bantul dari delapan indikator keberhasilan kolaborasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur Jaringan

Secara keseluruhan struktur jaringan pada kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi pemerintah menjadi *stakeholder* paling dominan dalam kolaborasi ini dalam menangani dan mengambil keputusan terkait pengembangan kelompok usaha OVOP dibandingkan dengan *stakeholder* lainnya.

2. Komitmen Terhadap Tujuan

keseluruhan kolaborasi terhadap komitmen dan pemerhatian dari pihak pemerintah dan instansi cukup baik, sudah sesuai rencana kerja dari TKPK yang melakukan pembinaan, pengembangan, dan promosi untuk kelompok usaha dalam memasarkan prodak yang dihasilkan melalui pameran selain itu juga dalam menjaga komitmen pemerintah selalu melibatkan semua pihak dalam

pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program akan tetapi kedepannya agar lebih bisa berkomitmen dengan pihak swasta dalam pengembangan permodalan jadi tidak selalu bergantung dengan APBD .

3. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku

Terkait dengan indikator kepercayaan diantara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sudah baik dalam pelaksanaanya namun masih ada rasa kurang percaya dari pihak pemerintah kepada pihak kelompok usaha terkait dengan dana bantuan langsung yang diberikan oleh pihak swasta kepada kelompok usaha.

4. *Governance*

Indikator *governance* tidak ada kendala karena dalam pembagian kekuasaan, kewenangan dan juga keanggotaan yang terlibat sudah diatur dalam *road maps* TKPK .

5. Akses Terhadap Kekuasaan

Indikator terhadap kekuasaan sudah ada otoritas yang jelas di setiap masing-masing *stakeholder*. Dengan adanya kejelasan tersebut maka *stakeholder* bisa melaksanakan wewenang dan mengimplementasikan keputusan yang sudah di buat.

6. Pembagian Akuntabilitas / Responsibilitas

keterlibatan dari masing-masing *stakeholder* untuk berbagai keputusan sudah dilakukan, masing-masing dari *stakeholder* selalu

memberikan laporan atau pertanggung jawaban terhadap semua kegiatan atau keputusan yang sudah dijalankan.

7. Berbagi Informasi

Akses informasi belum berjalan baik dari masing-masing *stakeholder* karena akses informasi yang hanya diberikan kepada kelompok usaha yang sudah aktif dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, hal ini perlu diperbaiki lagi karena akan merugikan untuk pemerintah sendiri sebab pemerintah tidak dapat melihat potensi besar yang sebenarnya belum tergali. dan untuk kelompok usaha yang pasif agar lebih aktif lagi untuk mencari informasi dan menjalin komunikasi baik dengan pihak pemerintah.

8. Akses Terhadap Sumberdaya

Akses sumber daya yang dibutuhkan dalam kolaborasi ini adalah sumber dana dan sumber daya manusia. Sumber dana yang digunakan dalam kolaborasi ini terbatas dari dana APBD, dan untuk memenuhi pendanaan tersebut pemerintah bekerja sama dengan pihak BNI untuk selanjutnya perlu bekerja dengan *stakeholder* lainnya untuk membantu peminjaman pemodalannya hanya kepada satu *stakeholder*. Sedangkan untuk sumber daya manusia masih diperlukan lagi bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya sebagai pendukung dan pengawas disemua kegiatan jadi tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak pemerintah

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Struktur Jaringan

Pada indikator struktur jaringan pemerintah kedepannya lebih baik membagi kewenangan dengan *stakeholder* dalam memutuskan sebuah keputusan agar tidak mendominasi dalam setiap keputusan yang akan diputuskan.

2. Komitmen Terhadap Tujuan

Kedepannya untuk pemerintah agar bisa lebih menjaga komitmen dengan pihak swasta untuk menjalin kerjasama agar tidak hanya sebatas kerjasama dalam permodalan tapi dalam hal lain pemerintah perlu melibatkan swasta.

3. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku

Pemerintah kedepannya diharapkan bisa meningkatkan rasa kepercayaannya kepada kelompok usaha dalam penggunaan dana bantuan yang diberikan oleh swasta agar dapat menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan kelompok usaha.

4. Berbagi informasi

Terkait dalam pembagian informasi pemerintah kedepannya tidak hanya membagi informasi untuk kelompok usaha yang sudah memiliki embrio usaha tapi juga kepada kelompok usaha yang sedang berkembang juga dan untuk kelompok usahanya lebih aktif

lagi mencari informasi serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah.

5. Akses Terhadap Sumberdaya

Untuk pemerintah kedepannya diharap tidak hanya dengan satu *stakeholder* bekerjasamanya melainkan menambah lagi mitra kerjanya untuk membantu dalam hal permodalan dan yang kedua terakait denga sumber daya manusia masih diperukan lagi bekrjasama dengan *stakeholder* lainnya sebagai pendukung dan pengawas disemua kegiatan jadi tidak dimana pihak pemerintah yang melaksanakan kegiatan.